



MUSRENBANG RKPD KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Lokal, didukung Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi”.

**BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH
25 MARET 2019**

TEMA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG

“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Lokal, didukung Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi”.

TUJUAN UTAMA MUSRENBANG

1. Sinkronisasi usulan kegiatan dari komunitas organisasi kemasyarakatan, Desa, dan Kecamatan dengan rancangan OPD Tingkat Kabupaten
2. Mematangkan RKPD Kabupaten sampai dengan pagu indikatif pendanaan OPD

Pedoman : Dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga hasil evaluasi kinerja hasil pembangunan daerah



**RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018-2023**

KEBUN TEH

MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI

"Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

MISI 1

Membangun masy
Jateng yg religius,
toleran & guyup untuk
menjaga NKRI



Membangun
masyarakat Jawa
Tengah semakin
religius, toleran, dan
guyup.

MISI 2

Mempercepat RB yg
dinamis serta memperluas
sasaran ke pem Kab/Kota.



Mewujudkan tata kelola
pem yang baik dan
bersih (good
governance and clean
government)

MISI 3

Memperkuat kapasitas
ekonomi rakyat &
membuka lap kerja untuk
mengurangi kemiskinan &
pengangguran



Menurunkan kemiskinan
secara merata &
Menciptakan stabilitas
ekonomi yang
berkualitas, menyebar,
dan inklusif

MISI 4

Menjadikan rakyat
Jateng lebih sehat, lebih
pintar, lebih berbudaya
& mencintai lingkungan



Membangun
sumberdaya manusia
yang berkualitas dan
berdaya saing.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2018 – 2023

2019

Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan & Pemanfaatan Iptek,



2020

Kat kesejahteraan masy didukung Kat Kualitas Hidup & Kapasitas SDM,



2021

Kat kesejahteraan dan perekonomian masy didukung penguatan daya saing SDM,



2022

Penguatan kesejahteraan & perekonomian masy didukung penguatan daya saing ekonomi daerah,



2023

Perwujudan masy Jateng yg semakin sejahtera & berdikari

2018 - 2023

PROGRAM UNGGULAN

PROVINSI JAWA TENGAH

- 1 Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi & magang gub untuk siswa SMA/SMK.
- 2 Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah & guru pendidik agama.
- 3 Reformasi birokrasi di kab/kota yg dinamis berbasis teknologi informasi & sistem layanan terintegrasi.
- 4 Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni.
- 5 Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda.
- 6 Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta ***melindungi kepentingan nelayan.***
- 7 Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta & bandara serta pembangunan embung/ irigasi.
- 8 Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi.
- 9 RS tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel.
- 10 Festival seni serta pengembangan infrastruktur OR, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

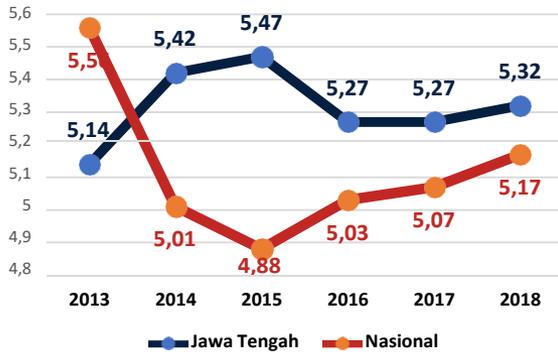




**INDIKATOR MAKRO
JAWA TENGAH**

KINERJA MAKRO JAWA TENGAH 2013-2018

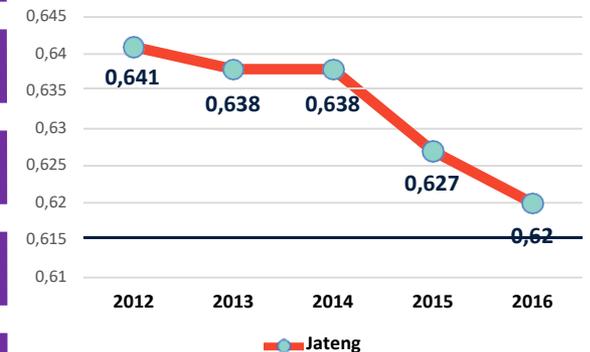
PERTUMBUHAN EKONOMI



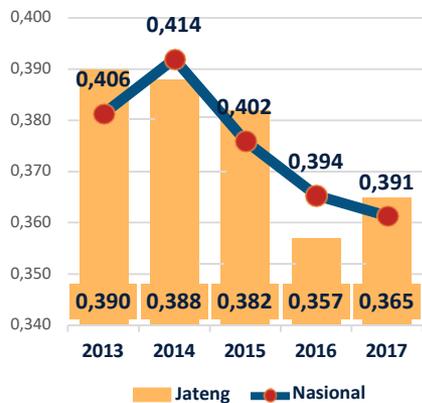
INFLASI



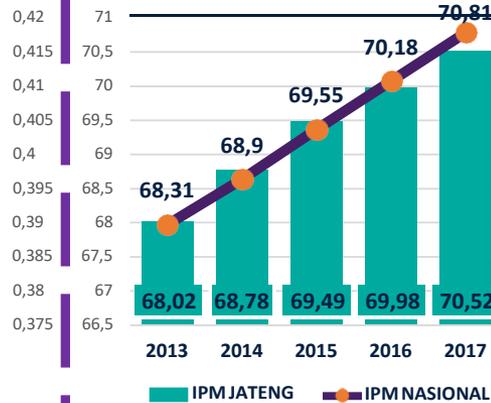
INDEKS WILLIAMSON



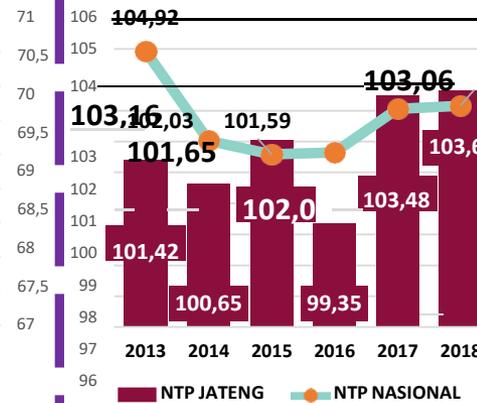
INDEKS GINI



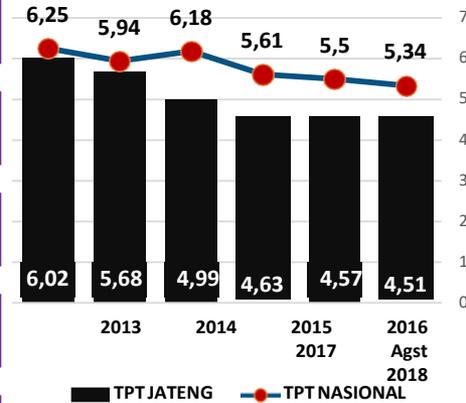
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



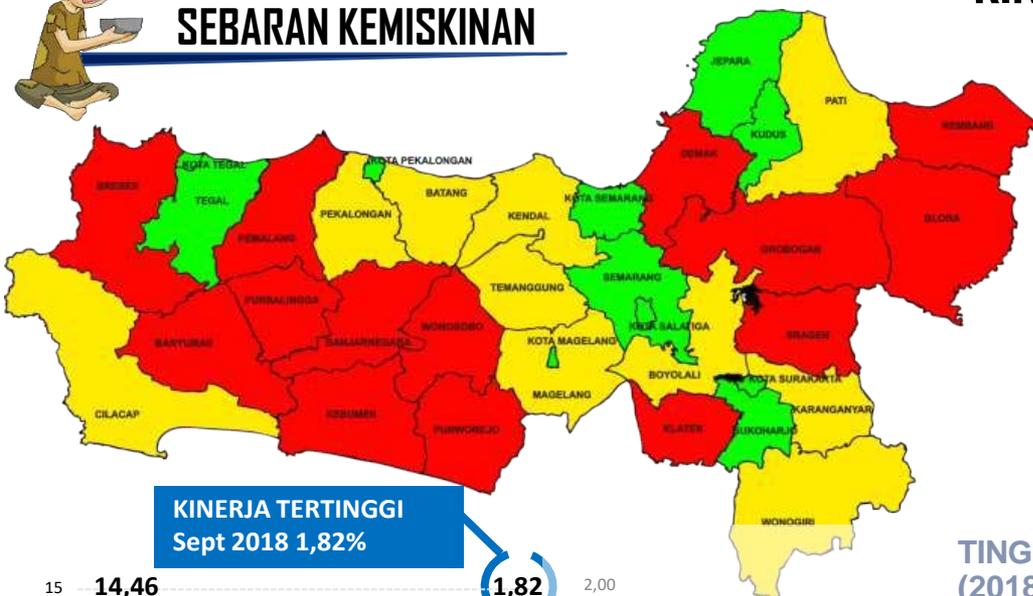
NILAI TUKAR PETANI



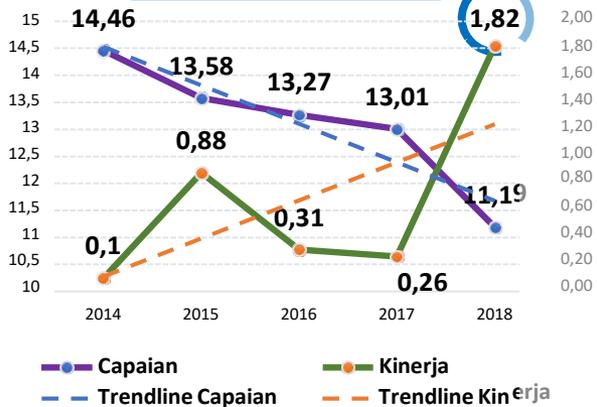
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA



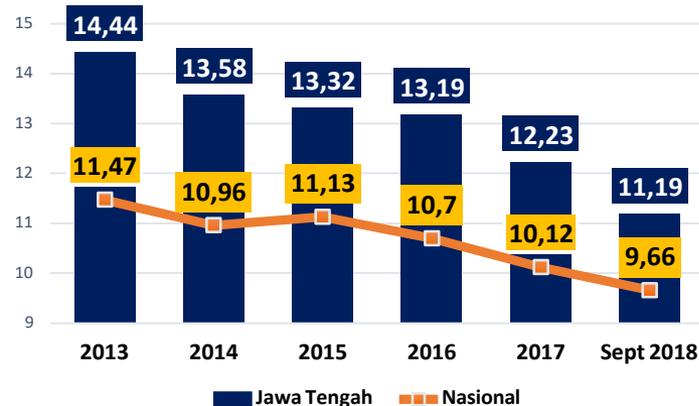
SEBARAN KEMISKINAN



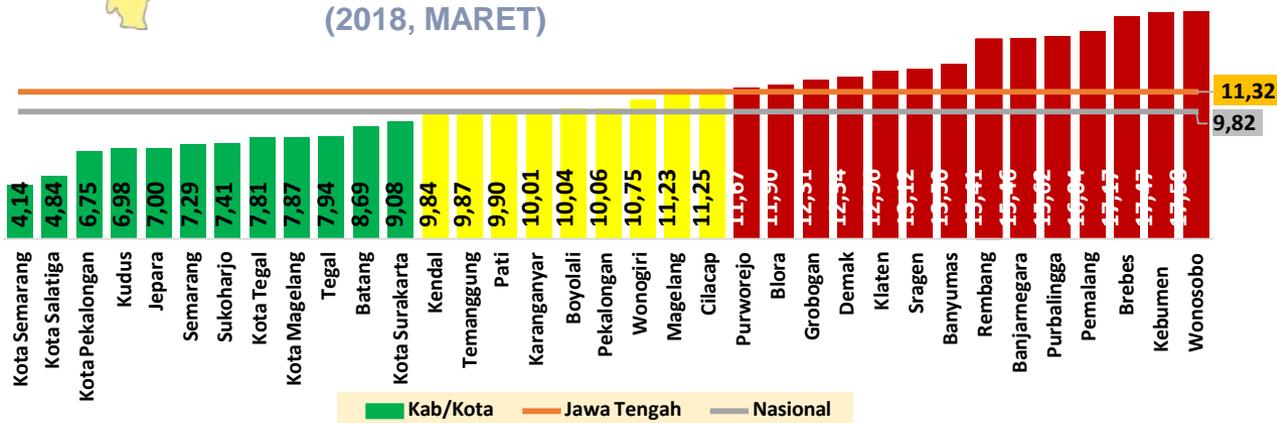
KINERJA TERTINGGI
Sept 2018 1,82%



KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN JAWA TENGAH 2013-2018



TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/ KOTA (2018, MARET)



ARAH PEMBANGUNAN

D
A
Y
A

S
A
I
N
G

KEUNGGULAN SDM

PELAYANAN DASAR SEMAKIN LUAS

INFRASTRUKTUR WILAYAH BERKUALITAS

KONDUSIVITAS WILAYAH MANTAP

KEMAMPUAN IPTEK MENINGKAT

PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS DAERAH

KEMISKINAN

DAYA SAING EKONOMI

KUALITAS DAN DAYA SAING SDM

PENGELOLAAN SDA & LH

KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

KONDUSIVITAS WILAYAH

T
A
N
T
A
N
G
A
N

&

P
E
L
U
A
N
G

PERSAINGAN PEREKONOMIAN GLOBAL, SDGS

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

DINAMIKA SOSIAL POLITIK

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN JAWA TENGAH TAHUN 2020



PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA TENGAH

1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Masih tingginya kemiskinan di perdesaan khususnya kelompok petani & nelayan

Masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*)



Rumah layak



Pangan



Pendidikan



Kesehatan



Listrik

Ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*)



kesempatan bekerja



permodalan



pasar



keterampilan



produktivitas

Data

Adanya ketidaktepatan sasaran prog/kog penanganan kemiskinan



2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM



PENDIDIKAN

- Pendidikan untuk semua (layanan pendidikan dasar, menengah dan tinggi);
- pendidikan budaya dan karakter;
- pemerataan pendidikan.

KESEHATAN

- Angka kesakitan dan angka kematian masih cukup tinggi.
- Tindakan preventif dan promotif.
- Penurunan disparitas akses & mutu pelayanan kesehatan,
- Pemenuhan sarpras kesehatan, serta tenaga kesehatan.



SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

- Bonus demografi (usia produktif lebih besar dari non produktif);
- Urbanisasi;
- Migrasi antar daerah.

3. Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Berusaha

Industri

- Ketersediaan bahan baku lokal.
- Ketersediaan energi untuk industri
- Pemanfaatan EBT masih rendah saat
- Ketersediaan sarana dan prasarana

Pertanian & Pangan

- Lemahnya akses permodalan, akses pasar & daya saing produk.
- Terbatasnya lahan pertanian (alih fungsi lahan)
- Penguatan jaringan pergudangan (resi gudang),
- Menyiapkan produk berorientasi ekspor

Perdagangan dan Jasa

- Lemahnya akses permodalan, akses pasar & daya saing produk.
- Pengembangan e-commerce

Investasi

- Pelayanan perijinan & Promosi investasi belum optimal,
- jaminan keamanan & kenyamanan
- Pertumbuhan dan persebaran investasi belum merata

Pariwisata

- Konektivitas antar destinasi wisata,
- Promosi wisata

Sumber Daya Manusia

- Ketersediaan & kemampuan SDM
- Program link and match
- Pengembangan teknologi

4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian SDA

- Penurunan kuantitas & kualitas cadangan air baku/ air bersih



• Bencana

- Bencana meningkat
- Rendahnya konservasi wilayah bencana,
- Kurangnya SDM & sarpras penanganan bencana,
- Kurangnya mitigasi/deteksi dini bencana oleh masy



- Pengelolaan hutan,
 - Tekanan pemanfaatan kawasan hutan oleh masy,
 - Pencurian
 - Kebakaran hutan,

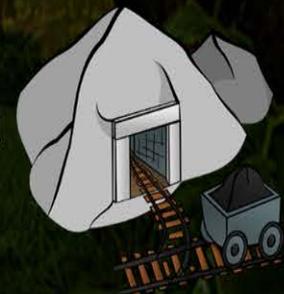


- Peningkatan volume sampah



- Kerusakan sumber daya pesisir (abrasi & sedimentasi)

- Maraknya Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)





Kedaulatan Pangan

- Produksi kedelai & jagung masih harus ditingkatkan
- Terbukanya arus bahan pangan impor
- Menyempitnya lahan pertanian (LP2B),
- Menurunnya tenaga kerja di sektor pertanian
- Penguatan jaringan pergudangan (resi gudang)
- Penguatan kelembagaan koperasi pertanian,
- Penyediaan infrastruktur distribusi pangan.
- Tingkat keberagaman konsumsi pangan belum beragam.
- Perlu menyiapkan produk pangan berorientasi ekspor, & mampu bersaing di pasar global,

Kedaulatan energi

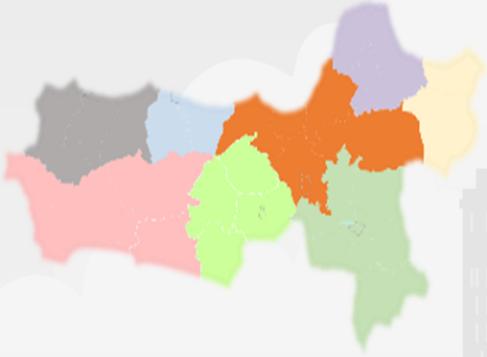
- Kebutuhan energi terus meningkat
- Ketergantungan terhadap sumber energi fosil,
- Pelayanan energi (listrik dan migas) masih terbatas, belum merata dan optimal
- Belum optimalnya pemanfaatan EBT, antara lain karena teknologi yg digunakan masih mahal, efisiensinya masih rendah & potensi energi yg ada biasanya bersifat lokal.



5.KEDAULATAN PANGAN & ENERGI



6. KESENJANGAN WILAYAH



- Masih banyak kab yang masuk kategori relatif tertinggal dibanding kabupaten/kota lain
- Terdapat kesenjangan antara wilayah, desa dan kota.

-
- Perlu membuka akses antar wilayah yang menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.
 - Prasarana jalan dan jembatan,
 - Jaringan komunikasi,
 - Transportasi publik (revitalisasi KA),
 - Jaringan energi
 - Perlu penguatan kehandalan sistem dan sistem pasokan bagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
 - Perlunya *grand desain* infrastruktur perhubungan (pengembangan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul & Pengembangan Bandara sebagai hub/transit internasional).

7.TATA KELOLA PEMERINTAHAN & KONDUSIVITAS WILAYAH

- Pelayanan Publik Prima
- Transparansi Informasi
- Ruang Pengaduan Masyarakat
- Penguatan Kelembagaan (Efektif & Efisien)
- Sinergitas & kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor
- Kemandirian Fiskal



FOKUS PEMBANGUNAN 2020

“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”

1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran

2. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM
3. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah dengan rencana obligasi daerah
5. Penurunan disparitas wilayah

Menuju

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Secara Lebih Berkeadilan dengan pendekatan *money follow program*, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 - 2023



No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Target Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase penurunan konflik SARA	15	15	15	15	15
2	Indeks Reformasi Birokrasi	77	80	81	82	83
3	Angka Kemiskinan	10,57	9,81	9,05	8,27	7,48
4	Indeks Gini	0,35	0,34	0,33	0,32	0,3
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,43	4,33	4,23	4,13	4
6	Pertumbuhan Ekonomi*)	5,3-5,7	5,4-5,8	5,7-6,1	5,9-6,3	6,1-6,5
7	Inflasi	3,5±1	3,0±1	3,0±1	3,0±1	3,0±1
8	PDRB per kapita	28	28,5	29	29,5	30
9	Indeks Williamson	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,6	72	72,5	72,7	73
11	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,23	92,25	92,27	92,29	92,31
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,69	66,87	67,02	67,14	67,26
13	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,20	102,42	102,72	102,96	103,15

CAPAIAN KINERJA KABUPATEN MAGELANG

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN MAGELANG

1. Laju **pertumbuhan ekonomi** Kab Magelang Tahun 2017 sebesar 5,06 %, lebih rendah dibanding tahun 2016 yang tumbuh sebesar 5,37%;
2. **inflasi** Tahun 2017 pada posisi 3,47% atau lebih tinggi dari Tahun 2016 sebesar 2,86 %;
3. **TPT** Kab Magelang Thn 2017 sebesar 2,44 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun sebesar 4,57%;
4. Jumlah penduduk miskin di Kab Magelang Tahun 2018 berjumlah 143,44 ribu orang dengan persentase penduduk miskin 11,23 % dari jumlah penduduk.
5. **IPM** Kab Magelang Tahun 2017 berjumlah 68,39 , lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 67,85.

APRESIASI TERHADAP PRESTASI KABUPATEN MAGELANG



1. Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia
2. Selaku Pembina BUMD, beberapa penghargaan diraih oleh Bapas 69, PDAM dan PD BPR BKK dalam beberapa kategori
3. Penganugerahan BPBD Kabupaten/Kota Terbaik II Tingkat BPBD Kabupaten/Kota Wilayah Barat
4. Kabupaten Layak Anak Kategori Madya
5. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya
6. Penghargaan Inisiasi Pelaksanaan Model Kampung Anak Sejahtera (KAS)
7. Predikat “Pasar Tertib Ukur” untuk Pasar Grabag dan Pasar Talun
8. Anugerah Bunda PAUD Tingkat Nasional (Bu Tanti)
9. Penghargaan Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori “Baik Dengan Catatan”
10. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik /KIP Award dalam kategori Badan Publik Cukup Informatif
11. Opini BPK “WTP” atas Laporan Keuangan Daerah
12. Penghargaan Apresiasi Pembinaan Proklamasi
13. Penghargaan Kategori Program Kampung Iklim Utama kepada Desa Taman Agung dan Desa Wonogiri Kabupaten Magelang

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH

PURWOMANGGUNG
(KAB. PURWOREJO, KAB. MAGELANG, KOTA MAGELANG, KAB. TEMANGGUNG)



PENGEMBANGAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA GUNA MENDORONG SEKTOR INDUSTRI PERTANIAN DENGAN BERLANDASKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)



- **PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS**
- **PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL KEBUREJO (KEBUMEN) DAN FASILITASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER**
- **PENGELOLAAN KELESTARIAN LINGKUNGAN (SAMPAH)**
- **PENGEMBANGAN AGROPOLITAN DAN PARIWISATA**
- **KHUSUSNYA KSPN BOROBUDUR**

HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM PENYUSUNAN RKPD KAB. MAGELANG



1. Hasil evaluasi cap. kinerja pembangunan Tahun 2017 sbg dasar penyusunan dok RKPD Kab Temanggung Tahun 2020, khususnya kinerja pembangunan yang belum tercapai agar mendapatkan **perhatian khusus**;



2. Memperhatikan **keselarasan dokumen perencanaan** dari perencanaan jangka panjang (RPJPN dan RPJPD), jangka menengah (RPJMN dan RPJMD), dan jangka pendek (RKP dan RKPD), serta keselarasan dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, dan penyusunan APBD;



3. Membangun **sinergi pembangunan antara Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota**, dalam mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah khususnya terkait pembangunan infrastruktur, kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kedaulatan pangan dan energi, serta menciptakan tata kelola pemerintahan, kondusivitas dan demokratisasi dalam mendukung daya saing wilayah;



4. Memperhatikan **tema pembangunan** provinsi dan menjadikan Kab Temanggung sebagai sub tema pada penyusunan RKPD Tahun 2020;



5. Menerapkan **prinsip money follow program priority** dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan dengan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan berbasis spasial;



6. Memperhatikan **aspek kewilayahan** dalam perencanaan pembangunan Tahun 2020 khususnya dalam alokasi anggaran dengan memperhatikan potensi masing-masing wilayah kecamatan sampai dengan desa;



7. Memperhatikan **aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan** dalam penyelenggaraan forum musrenbang sebagai bagian dari pendekatan bottom up planning, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan pusat dan provinsi sebagai bentuk implementasi pendekatan top down planning;



8. **Optimalisasi pelayanan publik** guna mengembangkan potensi dan daya saing daerah;



9. Melaksanakan **percepatan** pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);



10. Memperhatikan **dokumen perencanaan tata ruang** dalam perencanaan pembangunan;



11. Memperhatikan prinsip **pembangunan berkelanjutan dan antisipasi** dampak perubahan iklim;



12. Meningkatkan **kualitas belanja** agar lebih efisien dan efektif dengan berprinsip pada anggaran berbasis kinerja dan belanja publik untuk kesejahteraan masyarakat;



13. Memperhatikan mandat ***Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016*** tentang Pemerintahan Daerah terutama penyelesaian masalah pelimpahan kewenangan khususnya berkenaan dengan aset



Terimakasih

Jateng
gayeng